

MENGAPA ADA ALKITAB PROTESTAN DAN KATOLIK?

Bongsu Sitompul^{1*},

Kaventius²

pdt.bongsusitompul@yahoo.com^{1*}

STT Rahmat Emmanuel^{1*,2}

Abstrak

Perbedaan jumlah kitab dalam Alkitab Protestan dan Katolik sering menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Kristen. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan penerimaan kanon Perjanjian Lama, khususnya kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika dalam tradisi Katolik dan Apokrifa dalam tradisi Protestan. Artikel ini bertujuan menjelaskan latar belakang historis dan teologis munculnya perbedaan kanon antara kedua tradisi tersebut serta relevansinya bagi gereja masa kini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap literatur tentang kanon Alkitab, Septuaginta, Deuterokanonika/Apokrifa, sejarah gereja, dan dokumen resmi gerejawi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan kanon merupakan hasil dari proses sejarah penerimaan teks yang panjang dan kompleks, serta berkaitan dengan perbedaan pemahaman mengenai otoritas Kitab Suci, tradisi, dan gereja. Perbedaan tersebut perlu dipahami secara historis dan teologis agar tidak berkembang menjadi prasangka antartradisi Kristen. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap sejarah kanon dapat mendukung pendidikan teologi, dialog, dan sikap saling menghargai antara umat Protestan dan Katolik.

Kata kunci: kanon Alkitab; Protestan; Katolik; Deuterokanonika; Apokrifa; Septuaginta

Abstract

The difference in the number of books in Protestant and Catholic Bibles often raises questions among Christians. This difference is mainly related to the reception of the Old Testament canon, particularly the books known as the Deuterocanonical books in the Catholic tradition and the Apocrypha in the Protestant tradition. This article aims to explain the historical and theological background of the differences in the biblical canon between these two traditions and their relevance for the contemporary church. This study employs a literature review with a descriptive-analytical approach, examining literature on the biblical canon, the Septuagint, the Deuterocanonical books/Apocrypha, church history, and official ecclesiastical documents. The findings indicate that the differences in the canon resulted from a long and complex historical process of textual reception and are also related to different understandings of the authority of Scripture, tradition, and the church. These differences need to be understood historically and theologically so that they do not develop into prejudice between Christian traditions. Therefore, a proper understanding of the history of the biblical canon can contribute to theological education, dialogue, and mutual respect between Protestants and Catholics.

Keywords: biblical canon; Protestant; Catholic; Deuterocanonical books; Apocrypha; Septuagint

PENDAHULUAN

Alkitab menempati posisi sentral dalam kehidupan iman Kristen. Gereja membaca Alkitab sebagai kesaksian tertulis tentang karya Allah dan sebagai dasar bagi pengajaran, ibadah, pembentukan moral, serta pemberitaan Injil. Karena itu, pertanyaan mengenai kitab apa saja yang termasuk Kitab Suci bukanlah persoalan teknis semata. Pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan otoritas gereja, tradisi, penafsiran, dan cara umat memahami wahyu Allah. Dalam tradisi Katolik dan Protestan, pengakuan terhadap otoritas Kitab Suci pada dasarnya sama-sama penting, tetapi sejarah penerimaan kanon Perjanjian Lama menghasilkan daftar kitab yang berbeda.

Perbedaan tersebut paling terlihat pada kitab-kitab yang oleh Katolik disebut Deuterokanonika dan oleh banyak Protestan disebut Apokrif. Tradisi Katolik memasukkan Tobit, Yudit, Kebijakan Salomo, Sirakh, Barukh, serta 1 dan 2 Makabe ke dalam kanon Perjanjian Lama, bersama bagian-bagian Yunani dalam Ester dan Daniel. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa kanonnya terdiri atas 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru.¹ Tradisi Protestan umumnya menerima 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Perbedaan jumlah ini sering disederhanakan menjadi pertentangan antara “Alkitab Katolik” dan “Alkitab Protestan,” padahal sejarahnya jauh lebih kompleks.

Pembahasan tentang kanon perlu memperhatikan bahwa istilah “kanon” sendiri menunjuk pada daftar kitab yang diterima sebagai Kitab Suci sekaligus pada proses komunitas iman mengenali dan mengakui kitab-kitab tersebut. Kajian modern menunjukkan bahwa pembentukan kanon tidak berlangsung dalam satu peristiwa tunggal. Ada proses penggunaan, penyalinan, penerjemahan, pembacaan liturgis, perdebatan, dan akhirnya penegasan gerejawi. Karena itu, pembahasan tentang kanon harus menghindari anggapan bahwa seluruh gereja sejak awal memiliki satu daftar yang identik dan kemudian tiba-tiba terpecah pada abad keenam belas. Sejarah menunjukkan adanya keragaman tradisi teks dan praktik penerimaan jauh sebelum Reformasi.²

Artikel ini membahas persoalan tersebut dengan menempatkan tradisi Katolik dan Protestan dalam konteks sejarah kanon. Pertanyaan utama yang hendak dijawab ialah: mengapa jumlah kitab dalam Alkitab Katolik dan Protestan berbeda; bagaimana hubungan Kanon Ibrani, Septuaginta, dan perkembangan gereja dengan perbedaan tersebut; bagaimana kedua tradisi memberikan alasan teologis bagi penerimaan atau penolakan Deuterokanonika; serta bagaimana gereja masa kini seharusnya menyikapi perbedaan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, perbedaan kanon tidak diperlakukan sebagai alasan untuk mempertentangkan iman Kristen, tetapi sebagai persoalan sejarah dan teologi yang perlu dipelajari secara bertanggung jawab.

¹ Paulus Daun, *Seri Buku Teologia: Apakah Universalisme Itu?* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, n.d.), 24.

² Ken Gnanakan, *Theologia Misi* (Jakarta: YWAM Publishing Indonesia, 1995), 37.

Pertanyaan mengenai kanon juga perlu dibedakan dari pertanyaan mengenai inspirasi. Inspirasi berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah bekerja melalui penulis-penulis Kitab Suci, sedangkan kanon berkaitan dengan pengakuan komunitas iman terhadap tulisan yang diterima sebagai norma. Kedua hal tersebut saling berhubungan, tetapi tidak identik. Sebuah komunitas dapat memperdebatkan apakah suatu tulisan memiliki status kanonik justru karena mereka sedang mempertimbangkan sejarah penggunaan, kesaksian tradisi, dan karakter tulisan tersebut. Perbedaan ini membuat pembahasan menjadi lebih akademis dan mencegah kesimpulan yang terlalu cepat.

Selain itu, istilah “Katolik” dan “Protestan” tidak boleh digunakan untuk menyederhanakan seluruh keragaman Kristen. Ada tradisi Ortodoks yang memiliki sejarah kanon yang juga berbeda dalam beberapa hal. Demikian pula, di dalam dunia Protestan terdapat variasi dalam cara Apokrifa diperlakukan. Namun, artikel ini berfokus pada perbandingan Katolik dan Protestan sebagaimana menjadi pertanyaan utama tulisan. Fokus tersebut memungkinkan pembahasan diarahkan pada dua tradisi yang memiliki sejarah hubungan yang erat tetapi menghasilkan batas kanon Perjanjian Lama yang berbeda.

Dengan demikian, tujuan utama tulisan ini bukan menentukan pemenang dalam perdebatan kanon. Tujuannya adalah menjelaskan mengapa perbedaan itu muncul, bagaimana masing-masing tradisi memberi alasan terhadap posisinya, dan apa yang dapat dipelajari gereja masa kini dari sejarah tersebut. Pendekatan seperti ini penting bagi pendidikan teologi karena mahasiswa tidak hanya membutuhkan kesimpulan doktrinal, tetapi juga kemampuan membaca sejarah secara kritis. Sejarah kanon menjadi ruang belajar untuk mempertemukan keyakinan iman dengan ketelitian akademik.

Pertanyaan tentang kanon juga mempunyai dimensi pastoral. Jemaat yang menemukan perbedaan jumlah kitab dapat menganggap bahwa salah satu Alkitab pasti tidak benar. Jika gereja tidak memberikan penjelasan historis yang memadai, kebingungan tersebut mudah berubah menjadi prasangka antar denominasi. Pendidikan gereja perlu menjelaskan bahwa perbedaan kanon memiliki sejarah panjang dan bahwa istilah “Apokrifa” serta “Deuterokanonika” digunakan dalam konteks tradisi yang berbeda. Penjelasan yang jernih dapat menolong jemaat membedakan antara perbedaan doktrinal yang nyata dan tuduhan yang tidak berdasar.

Dengan demikian, pembahasan kanon memiliki relevansi bagi kehidupan gereja dan pendidikan teologi. Sejarah bukan hanya kumpulan tanggal dan nama konsili, tetapi sarana untuk memahami mengapa gereja mengambil posisi tertentu. Ketika sejarah dibaca dengan teliti, umat dapat mempertahankan keyakinannya dengan argumentasi yang lebih kuat sekaligus menghormati fakta bahwa komunitas Kristen lain memiliki cara berbeda dalam memahami otoritas dan tradisi. Inilah alasan mengapa pertanyaan tentang Alkitab Katolik dan Protestan layak dibahas secara akademis, bukan sekadar melalui perdebatan apologetis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari buku-buku mengenai kanon Alkitab, sejarah Perjanjian Lama, Septuaginta, literatur Deuterokanonika/Apokrifa, serta dokumen resmi gerejawi. Literatur dari perspektif Protestan dan Katolik digunakan secara berdampingan agar pembahasan tidak hanya bergantung pada satu tradisi. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu mengidentifikasi informasi historis tentang pembentukan dan penerimaan kanon, membandingkan dasar teologis kedua tradisi, kemudian menyusun sintesis mengenai makna perbedaan tersebut bagi gereja masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud menetapkan tradisi mana yang harus ditinggalkan, melainkan menjelaskan dasar historis dan teologis dari posisi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kanon Alkitab dan Proses Pembentukannya

Kanonisasi perlu dipahami sebagai proses pengenalan dan pengakuan terhadap tulisan yang diterima sebagai otoritatif dalam komunitas iman. Istilah kanon berasal dari kata Yunani *kanōn* yang berkaitan dengan ukuran atau standar. Dalam perkembangan pemakaian gerejawi, istilah ini kemudian menunjuk pada daftar kitab yang menjadi norma bagi iman. Pemahaman ini penting karena kanon bukan sekadar kumpulan buku yang dipilih secara administratif. Di balik daftar tersebut terdapat sejarah penggunaan teks, penerimaan komunitas, keyakinan tentang inspirasi, dan pengakuan terhadap otoritas tulisan. William W. Menzies dan Stanley M. Horton menekankan hubungan antara inspirasi, transmisi, dan kanon dalam pembahasan tentang Kitab Suci.³

Dalam sejarah Israel, tulisan-tulisan suci tidak muncul sekaligus dalam bentuk satu jilid. Taurat, kitab-kitab Nabi, dan tulisan-tulisan lainnya mengalami proses pembentukan dan penerimaan yang berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Karena itu, istilah “Kanon Ibrani” perlu digunakan dengan hati-hati. Para sarjana membahas perkembangan koleksi Taurat, Nabi-nabi, dan Ketubim, serta proses ketika kumpulan tersebut memperoleh status yang semakin mapan. Lee Martin McDonald menunjukkan bahwa sejarah kanon Perjanjian Lama melibatkan perkembangan konsep Kitab Suci dan penerimaan komunitas, bukan hanya penetapan daftar yang terjadi pada satu tanggal tertentu.⁴

Kanon Ibrani biasanya dihitung sebagai 24 kitab, sedangkan dalam tradisi Kristen Protestan kitab-kitab yang sama dihitung menjadi 39 karena beberapa kitab dipisahkan. Misalnya, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-raja, 1 dan 2 Tawarikh, serta dua belas nabi kecil dihitung berbeda. Dengan demikian, perbedaan angka 24 dan 39 tidak berarti bahwa isi

³ William W. Menzies and Stanley M. Horton, *Doktrin Alkitab* (Malang: Gandum Mas, 2003), 29.

⁴ Jan Christian Gertz and Angelika Berlejung, *Grundinformation Altes Testament: Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments*, 4th ed. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010), 28–33.

kanonnya berbeda. Perbedaan yang lebih substantif muncul ketika tradisi Kristen membandingkan daftar Ibrani dengan koleksi Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta atau LXX.

Septuaginta merupakan terjemahan dan tradisi teks Yunani yang berkembang dalam lingkungan Yahudi berbahasa Yunani. Sejarah Septuaginta sendiri tidak sesederhana gagasan bahwa seluruh Perjanjian Lama langsung diterjemahkan dalam satu peristiwa. Penerjemahan berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai kitab serta tradisi tekstual. Kristin De Troyer menjelaskan bahwa Septuaginta menjadi bidang penting bagi penelitian Alkitab karena di dalam tradisi Yunani tersebut terdapat bentuk teks yang berbeda dan juga kitab-kitab yang kemudian disebut Deuterokanonika atau Apokrifa.⁵ Hal ini menjelaskan mengapa sejarah kanon tidak dapat dipisahkan dari sejarah teks dan penerjemahan.

Kitab-kitab yang kemudian disebut Deuterokanonika atau Apokrifa muncul dalam lingkungan sastra Yahudi periode Bait Kedua. Cambridge History of Judaism menjelaskan bahwa kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika oleh Katolik secara umum berkaitan dengan kitab-kitab yang disebut Apokrifa dalam tradisi Protestan, dan sebagian besar muncul dalam tradisi Yunani Septuaginta, sementara tidak termasuk dalam kanon Ibrani yang diterima Protestan.⁶ Karena itu, istilah yang digunakan sebenarnya sudah menunjukkan posisi teologis masing-masing tradisi. “Deuterokanonika” mengungkapkan penerimaan kanonik dalam tradisi Katolik, sedangkan “Apokrifa” dalam penggunaan Protestan menunjukkan status yang tidak setara dengan kitab kanonik.

Dengan demikian, proses kanonisasi harus dipahami sebagai sejarah penerimaan yang panjang. Gereja tidak menciptakan isi wahyu Allah melalui keputusan administratif, tetapi gereja mengenali, menggunakan, dan akhirnya menegaskan kitab-kitab yang diterimanya sebagai Kitab Suci. Pada saat yang sama, keputusan gerejawi tetap penting karena menjadi bentuk publik dari pengakuan komunitas iman. Pemahaman ini membantu menjelaskan mengapa perbedaan kanon tidak dapat direduksi menjadi tuduhan bahwa salah satu pihak “menambah” atau “mengurangi” Alkitab secara sembarangan. Perbedaan tersebut berakar pada sejarah penerimaan teks yang kompleks.

Perlu juga dibedakan antara istilah kanon, kitab kanonik, dan daftar kanonik. Kanon menunjuk pada norma atau kumpulan tulisan yang memiliki otoritas, kitab kanonik menunjuk pada tulisan yang diterima dalam norma tersebut, sedangkan daftar kanonik merupakan bentuk eksplisit dari pengakuan komunitas terhadap kitab-kitab itu. Dalam sejarah gereja, penggunaan sebuah kitab dapat mendahului keputusan resmi

⁵ Esra Alfred Soru, *Doktrin Alkitab* (Kupang: Sylvia Kupang, 2009), 74–75.

⁶ Kristin De Troyer, “The Septuagint,” in *The New Cambridge History of the Bible*, vol. 1, *From the Beginnings to AD 1300*, ed. Richard Marsden and E. Ann Matter (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 267–88.

mengenai daftar kanon. Karena itu, keputusan konsili sebaiknya dipahami sebagai salah satu bentuk penegasan terhadap proses penerimaan yang sudah berlangsung, bukan selalu sebagai awal dari penggunaan sebuah kitab.

Proses kanon juga memperlihatkan bahwa istilah “Kitab Suci” sudah digunakan sebelum batas daftar kanon menjadi sepenuhnya eksplisit. Dalam komunitas Yahudi dan Kristen, teks-teks tertentu dibaca, diajarkan, disalin, dan digunakan dalam ibadah karena dianggap memiliki kewibawaan khusus. Seiring waktu, komunitas mulai membedakan tulisan yang memiliki tingkat otoritas berbeda. Lee Martin McDonald membedakan antara proses kanonik dan bentuk kanon yang sudah tertutup. Perbedaan tersebut berguna karena memungkinkan kita memahami bahwa pengakuan terhadap otoritas suatu tulisan dapat berkembang sebelum sebuah daftar final dirumuskan secara formal.⁷

Dari sudut pandang metodologis, pembahasan kanon karena itu harus menggunakan lebih dari satu jenis bukti. Bukti tekstual membantu menelusuri bentuk tulisan; bukti historis membantu melihat kapan dan di mana tulisan digunakan; bukti liturgis menunjukkan penerimaan dalam ibadah; sedangkan bukti teologis menjelaskan alasan komunitas memberikan otoritas tertentu. Tidak satu pun bukti tersebut boleh berdiri sendiri. Cara membaca seperti ini membuat studi kanon lebih bertanggung jawab dan mengurangi kecenderungan menggunakan satu kutipan sejarah untuk membuktikan kesimpulan yang terlalu luas.

Kanon Ibrani, Septuaginta, dan Deuterokanonika

Hubungan antara Kanon Ibrani dan Septuaginta merupakan salah satu kunci untuk memahami perbedaan kanon. Tradisi Ibrani menyediakan dasar bagi bentuk Perjanjian Lama yang kemudian diterima dalam tradisi Protestan. Sementara itu, gereja perdana hidup dalam dunia yang sangat dipengaruhi bahasa Yunani dan menggunakan Kitab Suci Yunani secara luas. Banyak kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru mengikuti bentuk teks Yunani. Keadaan ini menunjukkan bahwa kehidupan gereja mula-mula tidak berlangsung hanya dalam satu lingkungan bahasa dan tekstual.

Septuaginta juga tidak boleh dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang selalu identik di semua tempat dan zaman. Tradisi Septuaginta merupakan kumpulan manuskrip dan kitab dengan sejarah yang beragam. Karena itu, ketika dikatakan bahwa gereja menggunakan Septuaginta, yang dimaksud adalah tradisi Kitab Suci Yunani yang luas, bukan sebuah edisi tunggal yang sudah memiliki daftar final seperti Alkitab modern. Penelitian mengenai Septuaginta menunjukkan adanya variasi tekstual dan sejarah transmisi yang panjang.⁸ Kesadaran ini penting agar pembahasan tentang kanon

⁷ Lee Martin McDonald, *The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority* (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2007).

⁸ Jan Christian Gertz and Angelika Berlejung, *Grundinformation Altes Testament*, 28–33.

tidak menggunakan istilah Septuaginta secara terlalu sederhana.

Bagi tradisi Katolik, penerimaan kitab-kitab Deuterokanonika berkaitan erat dengan penggunaan kitab-kitab tersebut dalam tradisi gereja. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa gereja menerima 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru sebagai kanon.⁹ Dokumen Konsili Vatikan II juga menempatkan Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Magisterium dalam hubungan yang erat dalam kehidupan gereja.¹⁰ Dengan demikian, otoritas kanon dalam Katolik tidak hanya dijelaskan melalui pertanyaan tentang bahasa asli sebuah kitab, tetapi juga melalui penerimaan gerejawi dan Tradisi Apostolik.

Tradisi Protestan berkembang dengan penekanan yang kuat pada kembali kepada Kitab Suci sebagai norma tertinggi. Dalam konteks Reformasi, para reformator menempatkan kitab-kitab yang sesuai dengan Kanon Ibrani sebagai kitab Perjanjian Lama yang kanonik. F. F. Bruce menunjukkan bahwa persoalan kanon sudah menjadi bahan perdebatan jauh sebelum Reformasi dan bahwa tradisi Protestan, Katolik, serta Ortodoks memiliki perbedaan dalam daftar kitab.¹¹ Karena itu, Reformasi lebih tepat dipahami sebagai titik penting dalam penegasan kembali posisi tertentu terhadap kanon, bukan sebagai awal mutlak dari semua perdebatan tentang kitab-kitab tersebut.

Martin Luther dan tradisi Protestan tidak selalu memperlakukan Apokrifa sebagai tulisan yang sama sekali tidak berguna. Dalam tradisi Reformasi, kitab-kitab tersebut dapat dibaca untuk nilai sejarah dan moral, tetapi tidak ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dengan kitab-kitab kanonik. Hal ini menjadi pembedaan penting. Penolakan terhadap status kanonik tidak otomatis berarti penolakan terhadap nilai sastra atau historis. Karena itu, gereja Protestan dapat mempelajari 1 dan 2 Makabe, Tobit, Yudit, Sirakh, Kebijaksanaan, dan kitab-kitab lain tersebut tanpa menjadikannya dasar doktrin yang setara dengan kitab kanonik.

Di sisi lain, posisi Katolik tidak dapat digambarkan sekadar sebagai keputusan yang dibuat untuk menanggapi Reformasi. Gereja Katolik sendiri menegaskan bahwa penerimaan kanon memiliki akar dalam penggunaan dan tradisi gereja yang lebih awal. Komisi Kepausan untuk Kitab Suci menjelaskan bahwa dalam sejarah gereja Barat terdapat tradisi teks Ibrani dan tradisi Yunani-Latin, dan bahwa Konsili Florence serta Konsili Trente berperan dalam menegaskan daftar kanonik Katolik.¹² Dengan demikian, Konsili Trente merupakan penegasan definitif dalam konteks konflik Reformasi, tetapi tidak berarti bahwa kitab-kitab tersebut baru dikenal atau baru digunakan pada abad

⁹ Catechism of the Catholic Church, 2nd ed. (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1997), §§120–22.

¹⁰ Second Vatican Council, *Dei Verbum: Dogmatic Constitution on Divine Revelation* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1965), §10.

¹¹ F. Bruce, *The Canon of Scripture* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988).

¹² Pontifical Biblical Commission, *The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2001), sec. 2.

keenam belas.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa “Kanon Ibrani” dan “Septuaginta” tidak sekadar merupakan dua buku yang dapat dibandingkan halaman demi halaman. Keduanya mewakili tradisi tekstual yang berkembang dalam lingkungan historis berbeda. Septuaginta juga menjadi saksi penting bagi sejarah penafsiran karena penerjemah dan penyalin dapat menghadirkan pilihan kata, susunan, dan bentuk teks yang berbeda. Oleh sebab itu, keberadaan Deuterokanonika dalam tradisi Yunani perlu ditempatkan dalam sejarah perkembangan sastra Yahudi, bukan hanya dalam konflik denominasi masa kini.

Literatur Deuterokanonika juga memperlihatkan bahwa periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah masa kosong. Pada masa tersebut, komunitas Yahudi menghadapi perubahan politik, budaya, dan agama yang besar, terutama akibat pengaruh Helenisme dan kemudian kekuasaan Romawi. Tulisan-tulisan dari periode ini memberikan gambaran tentang bagaimana umat memahami kesetiaan kepada Allah, hukum, hikmat, penderitaan, dan harapan. Karena itu, sekalipun tradisi Protestan tidak memberikan status kanonik kepada kitab-kitab tersebut, literatur itu tetap memiliki nilai penting untuk studi sejarah agama dan latar belakang Perjanjian Baru.¹³

Di sisi lain, penggunaan Septuaginta dalam gereja perdana tidak boleh dijadikan argumen sederhana bahwa seluruh kitab yang terdapat dalam setiap bentuk Septuaginta otomatis dianggap kanonik oleh semua komunitas Kristen. Sejarah manuskrip menunjukkan bahwa koleksi dan penggunaan teks dapat beragam. Cambridge History of Judaism bahkan menekankan perlunya membedakan istilah dan sejarah masing-masing koleksi.¹⁴ Karena itu, hubungan antara Septuaginta dan kanon harus dijelaskan dengan nuansa. Septuaginta penting bagi sejarah Kekristenan awal, tetapi keberadaan sebuah kitab dalam tradisi Yunani tidak sendirinya menyelesaikan pertanyaan tentang status kanoniknya.

Perbedaan kanon juga perlu dikaitkan dengan cara gereja memahami sejarah penyelamatan. Bagi tradisi Katolik, kesinambungan antara Israel, gereja perdana, dan gereja sepanjang sejarah menjadi dasar penting dalam memahami penerimaan Kitab Suci. Bagi tradisi Protestan, kesinambungan tersebut tidak diabaikan, tetapi diuji melalui norma Kitab Suci. Kedua pendekatan sama-sama berusaha menjaga kesinambungan iman, tetapi menempatkan mekanisme pengenalan kanon secara berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan kanon pada akhirnya berkaitan dengan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana gereja mengetahui dan meneruskan kebenaran iman.

¹³ Lee Martin McDonald, *The Biblical Canon*, chap. 4.

¹⁴ “The Deuterocanonical or Apocryphal Books,” 409–503.

Dasar Teologis Tradisi Protestan dan Katolik

Perbedaan kanon pada akhirnya berhubungan dengan pertanyaan tentang otoritas. Tradisi Protestan menekankan Kitab Suci sebagai norma tertinggi bagi doktrin dan kehidupan gereja. Prinsip sola Scriptura tidak berarti bahwa Protestan menolak seluruh tradisi gereja. Yang ditekankan ialah bahwa tradisi, konsili, dan pendapat manusia harus diuji oleh Kitab Suci. Dalam kerangka ini, kitab-kitab yang tidak diterima dalam Kanon Ibrani tidak dapat diberi kedudukan yang sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama yang diterima sebagai kanonik. Argumen tersebut menjadi bagian penting dari identitas teologis Protestan sejak Reformasi.

Salah satu argumen yang sering dikemukakan dalam literatur Protestan adalah bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak memiliki kedudukan yang sama dalam tradisi Ibrani dan tidak dikutip secara eksplisit sebagai Kitab Suci dalam Perjanjian Baru. Argumen ini perlu dipakai secara hati-hati. Tidak adanya kutipan langsung tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu kitab pasti tidak kanonik, sebab hubungan antara teks Perjanjian Baru dan literatur Yahudi periode Bait Kedua sangat kompleks. Yang lebih kuat ialah kenyataan bahwa daftar kanon Ibrani dan tradisi penerimaan Protestan tidak memasukkan kitab-kitab tersebut sebagai bagian dari kanon Perjanjian Lama.

Tradisi Katolik memiliki kerangka otoritas yang berbeda. Katekismus menyatakan bahwa melalui Tradisi Apostolik gereja mengenali tulisan-tulisan yang harus termasuk dalam daftar kitab suci.¹⁵ Dalam kerangka ini, Kitab Suci tidak berdiri terpisah dari kehidupan gereja yang menerimanya. Dei Verbum menyatakan bahwa Tradisi Suci, Kitab Suci, dan Magisterium saling terikat dalam karya Roh Kudus.¹⁶ Karena itu, penerimaan Deuterokanonika merupakan bagian dari identitas gerejawi Katolik dan tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan ukuran yang berasal dari tradisi Protestan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertanyaan “siapa yang benar?” tidak dapat dijawab hanya dengan daftar kitab. Di balik daftar tersebut terdapat teori tentang bagaimana gereja mengenali wahyu dan bagaimana otoritas diwariskan. Protestan cenderung memberi tekanan normatif yang sangat kuat pada kesaksian Kitab Suci dan Kanon Ibrani untuk Perjanjian Lama. Katolik menempatkan Kitab Suci dalam hubungan erat dengan Tradisi Apostolik dan keputusan gerejawi. Perbedaan metodologis inilah yang membuat kedua tradisi sampai pada daftar kanon yang berbeda.

Pada titik ini, penting membedakan antara status kanonik dan manfaat suatu tulisan. Sebuah kitab dapat dianggap berharga secara historis, moral, atau teologis tanpa harus ditempatkan sebagai kitab kanonik. Sebaliknya, sebuah tradisi dapat mengakui kitab sebagai kanonik karena sejarah penerimaannya dalam gereja. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa umat Protestan dapat mempelajari Deuterokanonika tanpa mengakuinya sebagai dasar doktrin, sedangkan umat Katolik

¹⁵ Catechism of the Catholic Church, §120.

¹⁶ Second Vatican Council, Dei Verbum, §10.

membacanya sebagai bagian dari Kitab Suci. Perbedaan fungsi ini perlu dijelaskan secara jernih agar perdebatan tidak berubah menjadi karikatur terhadap keyakinan pihak lain.

Dengan demikian, perbedaan kanon tidak seharusnya dipakai untuk menuduh bahwa satu tradisi menghormati Alkitab sedangkan tradisi lain tidak. Kedua tradisi memiliki sejarah penghormatan terhadap Kitab Suci, tetapi menempatkan sejarah penerimaan dan otoritas gerejawi secara berbeda. Kesadaran ini memberikan dasar bagi dialog yang lebih sehat. Dialog teologis tidak menuntut penghapusan perbedaan, tetapi menuntut setiap pihak memahami alasan historis dan teologis pihak lain secara adil.

Perbedaan otoritas tersebut juga memengaruhi cara kedua tradisi membaca gereja dan tradisi. Dalam kerangka Protestan, tradisi memiliki fungsi penting sebagai kesaksian sejarah, tetapi tidak boleh ditempatkan di atas Kitab Suci. Dalam kerangka Katolik, Tradisi Apostolik bukan sekadar kumpulan kebiasaan manusia, melainkan bagian dari cara gereja menerima dan meneruskan wahyu. Perbedaan cara memahami hubungan Kitab Suci dan Tradisi inilah yang membuat perdebatan kanon sebenarnya merupakan bagian dari persoalan eklesiologi dan epistemologi teologis yang lebih luas.

Dalam perspektif Katolik, persoalan tersebut berkaitan pula dengan keyakinan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan menjaga deposit iman. Dei Verbum menyatakan bahwa Kitab Suci dan Tradisi Suci membentuk satu kesatuan yang diterima gereja dalam karya Roh Kudus.¹⁷ Karena itu, kanon tidak dipandang sebagai produk keputusan manusia yang berdiri di luar karya Allah, melainkan sebagai bagian dari perjalanan gereja dalam menerima wahyu. Penjelasan ini membantu memahami mengapa umat Katolik tidak melihat penerimaan Deuterokanonika sebagai tambahan arbitrer terhadap Kitab Suci.

Dalam perspektif Protestan, penekanan pada sola Scriptura harus dibaca dalam konteks Reformasi yang menolak penempatan keputusan gerejawi sebagai norma yang tidak dapat diuji. F. F. Bruce menunjukkan bahwa perdebatan kanon memiliki sejarah panjang dan bahwa Reformasi menghidupkan kembali pertanyaan tentang kitab mana yang seharusnya menjadi norma.¹⁸ Karena itu, posisi Protestan mengenai Apokrifa tidak sekadar didasarkan pada ketidaksukaan terhadap tradisi Katolik, tetapi berkaitan dengan cara memahami sumber normatif bagi doktrin. Pemahaman ini membuat perbedaan tersebut lebih mudah dianalisis secara akademis.

Dalam dialog teologis, penting pula membedakan antara otoritas kanonik dan otoritas historis. Sebuah tulisan yang tidak termasuk kanon Protestan tetap dapat menjadi sumber pengetahuan sejarah yang sangat bernilai. Sebaliknya, fakta bahwa sebuah tulisan memiliki nilai historis tidak otomatis mengubah status kanoniknya. Pembedaan ini memungkinkan para peneliti dari kedua tradisi membaca sumber yang sama dengan tujuan akademis yang sama, sekalipun mereka menghasilkan kesimpulan

¹⁷ Second Vatican Council, Dei Verbum, §10.

¹⁸ Bruce, The Canon of Scripture.

dogmatis yang berbeda. Dengan cara ini, penelitian tidak harus berakhir pada relativisme, tetapi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih tepat terhadap sejarah gereja.

Sejarah Penegasan Kanon dan Titik Balik Reformasi

Sejarah penegasan kanon memperlihatkan bahwa gereja Barat melewati proses yang panjang. Pada masa gereja awal, berbagai daftar kitab beredar dan para penulis gereja menggunakan kitab-kitab yang berbeda dengan tingkat otoritas yang tidak selalu sama. F. F. Bruce menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai kanon merupakan proses historis yang melibatkan penggunaan komunitas, pertimbangan teologis, dan perdebatan tentang kitab-kitab tertentu.¹⁹ Karena itu, tidak tepat menggambarkan sejarah kanon sebagai proses yang sepenuhnya seragam sejak zaman para rasul.

Dalam perkembangan gereja Barat, Vulgata memiliki pengaruh besar. Jerome sendiri memiliki pandangan yang kompleks mengenai kitab-kitab yang tidak terdapat dalam Kanon Ibrani, tetapi tradisi Vulgata kemudian memuat kitab-kitab tersebut dan penggunaannya dalam gereja berlangsung selama berabad-abad. Komisi Kepausan untuk Kitab Suci mencatat bahwa pada masa awal abad pertengahan terdapat dua tradisi tekstual yang berinteraksi, yaitu tradisi Ibrani untuk kitab-kitab dalam kanon Ibrani dan tradisi Yunani untuk kitab-kitab lainnya dalam bentuk Latin.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sejarah penerimaan tidak sesederhana pembagian “sejak awal Katolik menerima, sejak awal Protestan menolak.”

Reformasi abad keenam belas membawa penekanan baru pada kembali kepada sumber-sumber awal dan otoritas Kitab Suci. Martin Luther menempatkan kitab-kitab Apokrif di luar bagian utama Perjanjian Lama dalam terjemahannya. Sikap ini bukan berarti ia menganggap semua kitab tersebut tidak bernilai. Sebaliknya, kitab-kitab tersebut tetap dapat dibaca sebagai tulisan yang berguna, tetapi tidak mempunyai otoritas yang sama dengan Kitab Suci. Sikap ini kemudian menjadi pola yang berpengaruh dalam tradisi Protestan.

Konsili Trente menjadi titik balik penting dalam tradisi Katolik. Dalam konteks Reformasi, gereja Katolik menegaskan daftar kitab yang diterima sebagai kanonik. Katekismus Gereja Katolik kemudian merumuskan daftar tersebut sebagai 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru.²¹ Dengan demikian, Trente bukanlah awal dari keberadaan Deuterokanonika, tetapi merupakan penegasan resmi yang sangat penting bagi identitas Katolik pada masa ketika otoritas gereja dan prinsip Reformasi sedang diperdebatkan.

Perkembangan tersebut juga menunjukkan mengapa istilah “Deuterokanonika”

¹⁹ Bruce, *The Canon of Scripture*.

²⁰ Pontifical Biblical Commission, *The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible*, sec. 2.

²¹ Catechism of the Catholic Church, §120.

dan “Apokrifa” perlu digunakan dengan kesadaran terhadap konteks. Kedua istilah tidak sekadar menunjuk pada daftar buku yang sama, tetapi mencerminkan posisi teologis. Dalam studi akademik, lebih aman menggunakan istilah ganda “Deuterokanonika/Apokrifa” ketika membahas kedua tradisi secara bersamaan. Dengan cara itu, penulis tidak secara diam-diam mengambil posisi salah satu tradisi sebelum argumen dibangun.

Pada akhirnya, sejarah penegasan kanon memperlihatkan bahwa perbedaan Protestan dan Katolik memiliki dimensi historis sekaligus teologis. Reformasi menegaskan kembali batas kanon yang berbeda, sementara Katolik menegaskan daftar kanoniknya melalui tradisi dan konsili. Karena itu, pembaca masa kini perlu menghindari dua ekstrem: pertama, menganggap semua perbedaan kanon muncul hanya karena keputusan politik abad keenam belas; kedua, menganggap bahwa sejak awal sejarah gereja tidak pernah terdapat keragaman penerimaan. Kedua ekstrem tersebut tidak cukup menggambarkan kompleksitas sejarah.

Jika sejarah tersebut dibaca secara kronologis, terlihat bahwa abad keenam belas bukan titik awal pembicaraan tentang kanon, tetapi merupakan masa ketika perbedaan yang sudah lama berkembang memperoleh bentuk konfensional yang semakin tegas. Reformasi membuat pertanyaan tentang sumber otoritas menjadi sangat tajam. Di pihak Katolik, respons terhadap Reformasi mendorong penegasan doktrinal yang lebih eksplisit. Karena itu, hubungan antara sejarah kanon dan Reformasi perlu dilihat sebagai proses penguatan identitas teologis, bukan sebagai satu-satunya penyebab munculnya kitab-kitab Deuterokanonika.

Konsili Trente perlu ditempatkan dalam konteks tersebut. Ketika Reformasi mempertanyakan berbagai aspek otoritas gereja, gereja Katolik memberikan penegasan yang lebih eksplisit mengenai doktrin dan kanon. Sumber resmi Vatikan mencatat bahwa Konsili Florence pada 1442 dan Trente pada abad keenam belas berperan dalam penyelesaian keraguan dan penegasan daftar kanon Katolik.²² Dengan demikian, sejarah memperlihatkan adanya kesinambungan sekaligus perkembangan. Ada tradisi penggunaan yang lebih awal, tetapi ada pula momen ketika gereja merumuskan posisi secara lebih definitif.

Penting pula menghindari pembacaan sejarah yang bersifat polemis terhadap Martin Luther maupun gereja Katolik. Luther tidak “menghapus Alkitab” hanya karena menempatkan Apokrifa di luar kanon utama, sementara Konsili Trente juga tidak “menciptakan” Deuterokanonika dari ketiadaan. Kedua gambaran tersebut terlalu sederhana. Yang terjadi adalah dua tradisi gerejawi menegaskan batas kanon yang berbeda berdasarkan kerangka otoritas yang berbeda. Dengan demikian, studi sejarah kanon harus berusaha menjelaskan alasan setiap tradisi sebelum menilai implikasi

²² Pontifical Biblical Commission, *The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible*, sec. 2.

teologisnya.

Nilai Deuterokanonika/Apokrifa dan Sikap Gereja Masa Kini

Pertanyaan berikutnya ialah apakah kitab-kitab Deuterokanonika/Apokrifa masih berguna bagi iman Kristen masa kini. Jawabannya perlu dibedakan menurut status kanonik masing-masing tradisi. Dalam tradisi Katolik, kitab-kitab tersebut merupakan bagian dari Kitab Suci dan karena itu memiliki fungsi normatif dalam kehidupan iman. Dalam tradisi Protestan, kitab-kitab tersebut tidak mempunyai status kanonik yang sama, tetapi tetap dapat dipelajari sebagai literatur penting dari sejarah Yahudi dan dunia yang membentuk konteks Perjanjian Baru. Perbedaan ini memungkinkan adanya penghargaan terhadap nilai tulisan tanpa menghapus perbedaan doktrinal.

Secara historis, Deuterokanonika memberikan informasi penting mengenai perkembangan kehidupan religius Yahudi pada periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab 1 dan 2 Makabe, misalnya, berkaitan dengan konflik politik dan religius pada zaman Helenistik. Tobit dan Yudit menghadirkan bentuk sastra yang berbeda dan memperlihatkan tema kesetiaan kepada Allah, doa, keluarga, dan identitas komunitas. Sirakh serta Kebijaksanaan memberikan bahan penting untuk mempelajari perkembangan hikmat Yahudi. Cambridge History of Judaism menempatkan literatur ini dalam konteks periode Helenistik dan menunjukkan pentingnya memahami istilah serta sejarah transmisi teks tersebut.²³

Dari perspektif studi Perjanjian Baru, literatur Deuterokanonika/Apokrifa juga berguna untuk memahami dunia pemikiran Yahudi yang menjadi latar belakang gereja mula-mula. Literatur tersebut memperlihatkan perkembangan tema hikmat, kebangkitan, malaikat, penderitaan orang benar, martir, dan pengharapan. Namun penggunaan literatur tersebut harus dilakukan dengan metode historis yang tepat. Sebuah tema yang memiliki kemiripan dengan Perjanjian Baru tidak otomatis membuktikan bahwa penulis Perjanjian Baru menganggap kitab tersebut kanonik. Demikian pula, perbedaan teologis tidak berarti bahwa seluruh isi kitab tersebut tidak memiliki nilai historis.

Bagi gereja Protestan, sikap yang konstruktif ialah mempertahankan batas kanon sambil mengembangkan literasi sejarah Alkitab. Menolak status kanonik tidak perlu diikuti dengan penolakan terhadap studi akademik. Bahkan, pemahaman terhadap Deuterokanonika/Apokrifa dapat membantu mahasiswa teologi memahami dunia Yahudi periode Bait Kedua, perkembangan tradisi teks, serta sejarah gereja. Dengan cara ini, gereja dapat memelihara keyakinan tentang otoritas Kitab Suci sekaligus menghargai penelitian sejarah dan sastra.

²³ "The Deuterocanonical or Apocryphal Books," in *The Cambridge History of Judaism*, vol. 2, *The Hellenistic Age*, ed. W. D. Davies and Louis Finkelstein (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 409–503.

Bagi gereja Katolik, dialog dengan Protestan juga dapat dibangun tanpa harus menyembunyikan perbedaan kanon. Dokumen Katolik sendiri menempatkan Kitab Suci sebagai bagian dari kehidupan gereja dan mengakui pentingnya penafsiran dalam Tradisi.²⁴ Karena itu, dialog ekumenis tidak harus menghasilkan keseragaman daftar kitab. Yang diperlukan ialah kesediaan untuk menjelaskan alasan teologis secara jujur dan mendengar argumentasi pihak lain tanpa prasangka. Dialog yang sehat justru menjadi lebih kuat ketika perbedaan dinyatakan secara terbuka.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap sikap semacam ini semakin penting. Umat Katolik dan Protestan hidup berdampingan, bekerja sama, dan sering membaca Kitab Suci dalam konteks sosial yang sama. Perbedaan mengenai kanon tidak seharusnya menjadi sumber permusuhan. Gereja dapat mengajarkan bahwa ada perbedaan nyata mengenai daftar kitab dan otoritasnya, tetapi perbedaan tersebut tidak menghapus pengakuan bersama terhadap inti iman Kristen mengenai Allah, karya Kristus, dan keselamatan. Sikap ini tidak berarti mengaburkan doktrin, melainkan menempatkan perbedaan dalam kerangka kasih dan tanggung jawab akademik.

Karena itu, gereja modern perlu mengembangkan pendidikan Alkitab yang tidak hanya bersifat polemis. Mahasiswa teologi dan jemaat perlu diperkenalkan kepada sejarah kanon, Kanon Ibrani, Septuaginta, literatur periode Bait Kedua, Reformasi, serta Konsili Trente. Pengetahuan tersebut membantu umat membedakan antara fakta sejarah dan klaim apologetis. Pada akhirnya, tujuan mempelajari sejarah kanon bukan sekadar memenangkan perdebatan, tetapi menumbuhkan penghargaan terhadap Kitab Suci, ketelitian akademik, dan kedewasaan dalam hidup bersama sebagai umat Kristen.

Pendidikan teologi dapat menjadikan persoalan ini sebagai latihan penting dalam membaca perbedaan denominasi. Mahasiswa dapat diminta membandingkan teks, sejarah penerimaan, argumentasi kanonik, dan penggunaan liturgis tanpa langsung menjadikan perbedaan sebagai pertentangan pribadi. Pendekatan demikian membentuk kemampuan hermeneutis yang lebih matang. Seorang mahasiswa teologi perlu mampu mengatakan dengan jelas bahwa suatu tradisi memiliki alasan tertentu untuk menerima atau menolak sebuah kitab, sekaligus menjelaskan alasan tersebut tanpa memutarbalikkan posisi pihak lain.

Bagi kehidupan akademik, keberadaan dua tradisi kanon juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan pembacaan interkonfesional. Mahasiswa dapat mempelajari bagaimana satu teks diterima oleh satu komunitas dan diposisikan secara berbeda oleh komunitas lain. Proses ini mengajarkan bahwa sejarah penerimaan teks merupakan bagian dari sejarah identitas gereja. Kajian semacam itu juga dapat membantu mengurangi penyebaran informasi populer yang tidak akurat, misalnya anggapan bahwa perbedaan jumlah kitab baru muncul karena satu kelompok sengaja mengubah Alkitab untuk kepentingan politik.

²⁴ Second Vatican Council, *Dei Verbum*, §§21–24.

Sikap gereja masa kini juga perlu menghindari penggunaan Deuterokanonika/Apokrifa sebagai senjata polemik. Gereja Protestan dapat mempertahankan keyakinannya tentang 39 kitab Perjanjian Lama sambil mengakui bahwa kitab-kitab Deuterokanonika memiliki nilai historis dan sastra. Gereja Katolik dapat mempertahankan keyakinannya tentang 46 kitab Perjanjian Lama sambil menjelaskan dasar tradisi tersebut secara terbuka. Dialog seperti ini tidak menghapus perbedaan, tetapi mengubah cara perbedaan itu dibicarakan. Pada akhirnya, kedewasaan ekumenis terlihat ketika keyakinan teologis dapat dipertahankan tanpa merendahkan pihak lain.

Penghargaan terhadap perbedaan juga perlu berjalan bersama ketelitian dalam mengajarkan doktrin. Gereja tidak perlu menyembunyikan bahwa Katolik dan Protestan memiliki daftar kitab yang berbeda. Justru kejujuran mengenai perbedaan akan membuat pendidikan iman lebih matang. Umat perlu mengetahui kitab mana yang dianggap kanonik, mengapa tradisi tertentu mengakuinya, dan bagaimana tradisi lain menilainya. Pendidikan yang jujur semacam ini membangun iman yang tidak mudah terguncang oleh pertanyaan kritis karena umat memahami bukan hanya apa yang mereka percayai, tetapi juga alasan historis dan teologis di balik keyakinan tersebut.

KESIMPULAN

Perbedaan jumlah kitab dalam Alkitab Katolik dan Protestan terutama lahir dari sejarah penerimaan kanon yang berbeda, khususnya dalam hubungan antara Kanon Ibrani, Septuaginta, tradisi gereja, dan perkembangan teologis Reformasi. Tradisi Protestan menerima 39 kitab Perjanjian Lama dan menempatkan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai Apokrifa, sedangkan tradisi Katolik menerima 46 kitab Perjanjian Lama dan menyebut kitab-kitab tersebut Deuterokanonika. Perbedaan ini tidak muncul dari satu keputusan sederhana, melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Karena itu, gereja masa kini perlu menjelaskan perbedaan kanon secara historis dan teologis dengan adil. Kitab-kitab Deuterokanonika/Apokrifa tetap penting untuk dipelajari karena membantu memahami sejarah Yahudi, konteks dunia Perjanjian Baru, perkembangan sastra keagamaan, dan sejarah gereja, meskipun status kanoniknya berbeda menurut tradisi. Sikap yang tepat bukan menghapus perbedaan, melainkan mempertahankan keyakinan teologis masing-masing sambil membangun dialog, penghargaan, dan kerja sama Kristen yang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, F. F. *The Canon of Scripture*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
- Daun, Paulus. *Seri Buku Teologia: Apakah Universalisme Itu?* Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, n.d.
- De Troyer, Kristin. "The Septuagint." In *The New Cambridge History of the Bible*, vol. 1, *From the Beginnings to AD 1300*, edited by Richard Marsden and E. Ann Matter,

- 267–288. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Gertz, Jan Christian, and Angelika Berlejung. *Grundinformation Altes Testament: Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments*. 4th ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
- Gnanakan, Ken. *Theologia Misi*. Jakarta: YWAM Publishing Indonesia, 1995.
- McDonald, Lee Martin. *The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority*. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2007.
- Menzies, William W., and Stanley M. Horton. *Doktrin Alkitab*. Malang: Gandum Mas, 2003.
- Pontifical Biblical Commission. *The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2001.
- Soru, Esra Alfred. *Doktrin Alkitab*. Kupang: Sylvia Kupang, 2009.
- Second Vatican Council. *Dei Verbum: Dogmatic Constitution on Divine Revelation*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1965.
- Sitompul, Bongsu, and Kaventius. “Mengapa Ada Alkitab Protestan dan Katolik?” Manuscript, 2026.
- The Deuterocanonical or Apocryphal Books. In *The Cambridge History of Judaism*, vol. 2, *The Hellenistic Age*, edited by W. D. Davies and Louis Finkelstein, 409–503. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Wongso, Peter S. *Doktrin Alkitab untuk Pembaca Masa Kini*. Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2018.
- Catechism of the Catholic Church. 2nd ed. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1997.